

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas untuk penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan Gubernur serta pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah.
2. Wilayah Kelurahan Bidara Cina adalah salah satu kelurahan yang mempunyai permasalahan ketertiban umum dan sosial yang beragam, mulai dari masalah konflik internal warga, premanisme, pedagang kaki lima (PKL), penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), hingga penanggulangan bencana yang sering terjadi yakni banjir.
3. Anggota Satpol PP Kelurahan Bidara Cina yang berjumlah 8 orang dituntut mampu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), selain itu Satpol PP Kelurahan Bidara Cina secara langsung atau tidak langsung melaksanakan tugas, perintah, penanganan laporan masyarakat, dan berkoordinasi dengan RT, RW, LMK dan unsur Kelurahan Bidara Cina dalam permasalahan kewilayahan.
4. Analisis Beban kerja yang diemban petugas Satpol PP Kelurahan Bidara Cina, dinilai melampau atau melebihi beban kerja yang seharusnya dijalani masing – masing personil.
5. Faktor yang mempengaruhi beban kerja yaitu faktor eksternal meliputi tugas – tugas, organisasi, dan lingkungan kerja, sedangkan faktor internal yakni faktor somatic dan faktor psikis.

6. Analisis beban kerja tersebut didapat dari keterangan narasumber, observasi langsung oleh peneliti, dan hasil perhitungan analisis beban kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RBRI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja.

B. Saran

Dilihat dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Menambah personil Satpol PP Kelurahan Bidara Cina yang saat ini berjumlah 8 orang menjadi 16 orang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemetaan analisa jabatan secara keseluruhan dalam instansi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, sehingga personil anggota Satpol PP Kelurahan Bidara Cina dapat maksimal dalam menjalankan semua tugas yang diemban.
- b. Jabatan PJLP disamakan dengan jabatan PTT dalam hal status kepegawaian, pendapatan, tunjangan, dan hak – hak lainnya yang melekat. Hal tersebut dikarenakan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas tidak ada perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyana, M. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja Room Attendant Di Grand Jatra Hotel Pekanbaru*. 3(2):368.
- Ali, H., Sastrodiharjo, I., & Saputra, F. (2022). *Pengukuran Organizational Citizenship Behavior: Beban Kerja, Budaya Kerja dan Motivasi (Studi Literature Review)*. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1 (1), 83-93.
- Anggraeni, Linanda Eka. “*Analisis Beban Kerja untuk Menentukan Jumlah Karyawan Optimal (Studi Kasus PT. Sanjayatama Lestari Surabaya)*” III (2015).
- Astianto, A., Supriyadi H. (2014). *Pengaruh Stres Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PDAM Surabaya. Tugas Akhir. STIESIA*. Surabaya. <https://ejournal.stiesia.ac.id>
- Budaya, Pinkie Winandari. “*Workload Analysis in Quality Control Department*” 11 (2018).
- Chazawi, A. (2013). *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit : PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 2)
- Chazawi, A. (2021). *HUKUM PIDANA POSITIF PENGHINAAN: Edisi Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Creswell, John W, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 135.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*. 3 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fetrina, Elvi. “*Analisis Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Perhitungan Beban Kerja Pegawai (Studi Kasus: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*” 10, No. 2 (2017).
- Hamid, S. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan*. Yogyakarta: Deepublish

- Hasibuan, S.P Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Herrianto, R. 2010. *Kesehatan Kerja*. Jakarta. Buku Kedokteran EGC.
- Mantindas. 2003. *Manajemen SDM Lewat Konsep AKU*. Jakarta. Pustaka Utama Grafitri
- Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), 57.
- Marwansyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Dua. Cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta,CV
- Nugroho, Septian. *Analisis Beban Kerja dalam Penentuan Jumlah Tenaga Kerja Optimal pada Departemen Packing (Studi Kasus PT. Arjuna Utama Kimia Surabaya)*,t.t.
- Pranoto, L.Hardi dan Retnowati. 2016. *Analisis Beban Kerja Sumber Daya Manusia*. Perusahaan.Ppm Manajemen. Jakarta.
- Robert K. Yin, Studi Kasus : *Desain dan Metode (Case Study Research: Design and Methods)*, trans. oleh M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 1.
- Rodahl (1989), dalam Manuaba (2000). *Hubungan Beban Kerja dan Kapasitas Kerja*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Susanto, Eko. 2018. *Analisis Pengukuran Beban Kerja Fisik Dan Mental Pekerja UKM Tahu (Studi pada UKM Tahu Kertasutra Di Dusun 1 Kertasutra Kecamatan Kertasutra Kabupaten Sukoharjo)*. Fakultas Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tarwaka, Solichul, H, A. Bakri, L,S. (2004). *Ergonomi untuk Keselamatan, UNIBA*, Surakarta.
- Yo, P., Melati, P., & Surya, I. B. K. (2015). *Pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja dengan stres kerja sebagai variabel mediasi* (Doctoral dissertation, Udayana University).

<https://kependudukancapil.jakarta.go.id/pusdatin> Dinas Dukcapil DKI Jakarta

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143660/permen-pan-rb-no-1-tahun-2020>,
Sekretariat Website JDIH BPK RI

<https://satpolpp.jakarta.go.id/>, pusdatin Satpol PP DKI Jakarta

<https://statistik.jakarta.go.id/kejadian-kejahatan-pelanggaran-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat-di-dki-jakarta>

Peraturan Perundang - undangan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. 2020. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang tugas dan fungsi Satpol PP. 2018. Jakarta: Presiden RI.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8. 2008. Ketertiban Umum. Jakarta: Biro Hukum dan Ortala.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A